AKAD TIJARAH DALAM ASURANSI SYARIAH: ANALISIS KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Dede Maman Fathurahman *¹

Dimas Ganjar Pinasti ²

Azka Saqina Salsabila ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002039@student.unsil.ac.id¹, 231002042@student.unsil.ac.id²,
231002002@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id³, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Asuransi syariah merupakan sistem proteksi keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Dalam operasionalnya, asuransi syariah menggunakan berbagai jenis akad, salah satunya adalah akad tijarah yang berperan penting dalam aspek komersial perusahaan. Penelitian ini mengkaji konsep akad tijarah dalam konteks asuransi syariah, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tijarah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan keberlangsungan bisnis asuransi syariah.

Kata kunci: Akad Tijarah, Asuransi Syariah, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam

Abstract

Sharia insurance is a rapidly growing financial protection system in Indonesia and other Muslim countries. In its operations, sharia insurance uses various types of contracts, one of which is the tijarah contract, which plays an important role in the commercial aspects of the company. This study examines the concept of tijarah contract in the context of Islamic insurance, its implementation, and the challenges faced in practice. The research method uses a qualitative approach with a literature study from various scientific journals and related regulations. The results show that the tijarah contract has a strategic role in maintaining a balance between sharia principles and the sustainability of the Islamic insurance business.

Keywords: Commercial Contracts, Sharia Insurance, Fiqh Muamalah, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir. Kehadiran asuransi syariah memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan perlindungan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba, asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Asuransi adalah bentuk usaha pertanggungangan dari beberapa kelompok orang dimanapihak pengelola dana adalah perusahaan asuransi. Nilai dasar dari asuransi syariah adalah menggabungkan orientasi pada keuntungan dengan orientasi sosial dalam kegiatan produksinya, dengan sebagian keuntungannya digunakan untuk memecahkan masalah sosial melalui konsep tolong menolong. Keadilan yang sesuai dengan ajaran islam menjadi acuan utama dalam asuransi. Produk asuransi dialokasikan dalam beberapa bagian seperti asuransiljiwa, asuransilkerugian, dan reasuransi(Ichsan 2014).

Prinsip penting dalam asuransi syariah adalah, sebagai wujud kemaslahatan umat manusia, terwujud melalui kerjasama antara peserta asuransi dan perusahaan. Melalui akad seperti tijarah, tabarru', mudharabahmusytarakah, danlwakalah billujrah, prinsip asuransilyariah dijunjung,

menghindari praktik yang dilarang seperti riba, maysir, dan gharar. Akad dalam asuransi, terbagi menjadi akad *Itabarru'*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah*, menjadi fondasi operasional yang menggerakkan produk-produk asuransi syariah. Dengan demikian, asuransi syariah menjadi sarana perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip asuransi syariah yang dipegang teguh (HAIRANI 2024).

Dalam operasional asuransi syariah, terdapat dua jenis akad utama yang digunakan, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad tolong-menolong antar peserta, sedangkan akad *tijarah* adalah akad komersial antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah. Pemahaman yang komprehensif tentang akad *tijarah* menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek bisnis dan keberlanjutan perusahaan asuransi syariah. Akad ini bisa berubah jenis menjadi akad *Itabarru'* apabila terdapat kerelaan dari pihak yang haknya tertahan diberikan kepada pihak yang belum menunaikan kewajibannya (Ichsan 2014). Dalam asuransi syariah, terdapat akad penerimaan hibah yang menggambarkan pemberian suka rela kepada nasabah yang mengalami musibah. Dan yang diberikan sebagai hibah berasal dari premi yang dikumpulkan dari peserta lain, mencerminkan semangat saling tolong-menolong dan kepedulian dalam sistem asuransi syariah (Ramadhan 2022).

Pada penelitian sebelumnya, penulis menggunakan metode kajian literatur dengan pembahasan mengenai dasar hukum asuransi syariah seperti dalam firman Allah: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Qs. al-Maidah [15]:2) (Abdullah 2018). Penelitian ini menitikberatkan pada akad *tijarah* dalam asuransi syariah. Pembahasannya mencakup konsep akad-akad *tijarah* dalam asuransi syariah serta implementasinya.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep akad *Tijarah* yang digunakan dalam operasional asuransi syariah, serta mengkaji implementasi akad-akad tersebut dalam produk asuransi syariah. Fokus penelitian ini terletak pada akad-akad *Tijarah* khusus dalam asuransi syariah. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai jenis akad dalam asuransi syariah, baik dari segi definisi maupun penerapannya pada produk asuransi syariah yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami konsep dan implementasi akad *tijarah* dalam asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* berasal dari kata "tjarah" yang dalam bahasa Arab berarti perdagangan atau perniagaan. Dalam konteks ekonomi Islam, akad *tijarah* merujuk pada segala bentuk transaksi komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Dalam fiqh muamalah, akad *tijarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, antara lain: adanya pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan *shighat* akad

(ijab dan qabul). Selain itu, akad tijarah harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar, maysir, riba, dan objek yang haram.

Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (Mudorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah)(Abdullah 2018).

B. Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min. Penanggung disebut musta'min dan yang bertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata amana yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung.(Sula 2004)

Asuransi syariah atau takaful adalah sistem proteksi bersama di mana para peserta saling menanggung risiko melalui kontribusi ke dalam dana tabarru'. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur operasional asuransi syariah, termasuk penggunaan akad-akad syariah yang diperbolehkan.

Sedangkan asuransi menurut Undang Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian)(Abdullah 2018).

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset-aset dan atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah(Abdullah 2018).

Sedangkan dalam ensiklopedia Hukum Islam yang dikutip Hasan Ali disebutkan bahwa asuransi syariah adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.(Abdullah 2018)

C. Jenis-Jenis Akad dalam Asuransi Syariah

Dalam operasional asuransi syariah, terdapat dua kategori akad utama:

a. Akad Tabarru'

Akad ini bersifat non-profit dan berorientasi pada tolong-menolong. Dana dari peserta dikumpulkan dalam dana tabarru' yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah.

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad tabarru adalah akad hibah dan akad tabarru' tidak bisa berubah

menjadi akad tijaroh. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

b. **Akad Tijarah**

Akad ini bersifat komersial dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks asuransi syariah, akad tijarah dapat berupa mudharabah, mudharabah musytarakah, wakalah bil ujah, atau kombinasi dari keduanya.

D. Akad Tijarah dalam Operasional Asuransi Syariah

Dalam praktik asuransi syariah, akad tijarah diimplementasikan melalui beberapa bentuk:

1. **Akad Mudharabah**

Akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib). Dalam konteks asuransi syariah, peserta bertindak sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi sebagai pengelola. Keuntungan dari investasi dana peserta dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pengelola (Tito and Sobarna 2025).

Penerapan akad mudharabah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, di antaranya:

- a. **Transparansi:** Pemilik modal harus mengetahui informasi penggunaan dan hasil pengelolaan modal.
- b. **Keadilan:** Pembagian keuntungan dilakukan proporsional dan adil.
- c. **Tidak ada riba, maysir, dan gharar:** Investasi harus bebas dari unsur spekulasi, bunga, dan ketidakpastian.
- d. **Amanah:** Pengelola dana harus bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugasnya.

Dalam asuransi syariah, akad mudharabah digunakan sebagai mekanisme bagi hasil antara peserta asuransi (pemegang polis) dan perusahaan asuransi (pengelola dana). Berdasarkan konsep ini, peserta asuransi bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Perusahaan asuransi syariah mengelola kontribusi dana peserta untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari investasi tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Antonio 2001). Dalam model mudharabah premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- a. **Dana Sosial (Dana Tabarru')** Dana ini merupakan kontribusi peserta yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun), bukan untuk tujuan komersial. Tidak termasuk dalam mekanisme bagi hasil karena merupakan dana sosial.
- b. **Dana Investasi (Dana Mudharabah)** Dana ini diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah dalam instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Keuntungan dari investasi ini dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta berdasarkan nisbah yang disepakati (Karim 2001).

Adapun struktur akad Mudharabah dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a. **Peserta Asuransi (Shahibul Mal)** Menyetorkan dana kontribusi dalam bentuk premi asuransi serta memiliki hak atas sebagian keuntungan yang dihasilkan dari investasi.
- b. **Perusahaan Asuransi (Mudharib)** Mengelola dana peserta dalam investasi berbasis syariah dan bertanggung jawab atas transparansi pengelolaan dan distribusi keuntungan.

- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Memastikan operasional asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah serta mengawasi penggunaan dana agar tidak melanggar hukum Islam. (Tito and Sobarna 2025)

2. Akad Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujrah adalah akad perwakilan dengan imbalan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana dengan mendapatkan fee atau ujrah. Model ini memberikan kepastian pendapatan bagi perusahaan dan transparansi biaya bagi peserta.

Akad wakalah bil ujahialah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi oleh peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non-saving). Jafri Khalil menyimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad tabarru' dan mudharabah. Beberapa akad tijarah lainnya, seperti musyarakah, wakalah, wadiah, syirkahdan lainnya yang dibenarkan oleh syara' untuk digunakan dalam asuransi syariah (Sula 2004).

Uraian di atas menegaskan bahwa dalam asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru' (non-saving) akad-akad yang digunakan tidak hanya sebatas akad tabarru' dan mudharabah. Beberapa akad tijarah lainnya, seperti musyarakah, wakalah, wadiah, syirkahdan lainnya yang dibenarkan oleh syara' untuk digunakan dalam asuransi syariah. Produk PRUlink assurance account adalah produk asuransi jiwa yang menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada produk PRUlink assurance account termasuk ke dalam akad yang dibenarkan oleh syara' untuk digunakan dalam asuransi syariah.

3. Akad Mudharabah Musytarakah

Model ini merupakan kombinasi antara mudharabah dan musyarakah, di mana perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pengelola tetapi juga menyertakan modalnya sendiri dalam investasi. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pihak.

Akad Tijarah yang kemudian disamakan atau disebut Mudhrabaha Musytarakah bertujuan memberi kuasa kepada lembaga asuransi untuk mengelola dan menjadikan dana tersebut menjadi dana Tabarru' dari dana Investasi peserta, kemudian disatukan dengan dana atau modal perusahaan, dan dijalankan berdasarkan dengan kesepakatan dibuat awal baik pembagian hasil dan lain-lain, yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya sebagaimana dalam Peraturan pemerintah (Habibaty 2019).

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini 37Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 18 Tahun 2010 Tentang : Penyelenggaraan Asuransi dan Reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah. Bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari mudharabah dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah. (Nopriansyah 2024) Akad Mudharabah Musytarakah merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

E. Tantangan dalam Implementasi Akad Tijarah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad tijarah dalam asuransi syariah antara lain:

- a. Pemahaman Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan fundamental antara asuransi syariah dan konvensional, termasuk konsep

- akad tijarah. Edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.
- b. Kompleksitas Produk: Penggunaan berbagai jenis akad dalam satu produk asuransi syariah dapat menimbulkan kompleksitas yang membingungkan peserta. Transparansi dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi hal ini.
 - c. Regulasi dan Pengawasan: Meskipun regulasi tentang asuransi syariah telah ada, masih diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan aturan untuk memastikan implementasi akad tijarah sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan peserta.
 - d. Daya Saing: Perusahaan asuransi syariah harus mampu bersaing dengan asuransi konvensional dalam hal produk, layanan, dan return investasi, sambil tetap mematuhi prinsip syariah yang ketat.

F. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran vital dalam memastikan bahwa implementasi akad tijarah sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan terhadap produk, transaksi, dan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah. Keberadaan DPS memberikan jaminan kepatuhan syariah yang menjadi nilai tambah bagi asuransi syariah.

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32 maupun undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI (Iswanto 2016).

DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangann syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, yaitu: (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/ yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. (b) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. (c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan (Mahyudi, Nuryanti, and Haryetti 2017)

Menurut keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar MUI, DSN bertugas sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selain itu juga DSN mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia. (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah (LKS). (d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang

telah dikeluarkan oleh DSN. (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Ilyas 2021).

KESIMPULAN

Asuransi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sebagai alternatif perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah beroperasi bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba, dengan mengedepankan nilai keadilan dan tolong-menolong.

Dalam operasionalnya, asuransi syariah menggunakan dua kategori akad utama: **akad tabarru'** yang bersifat sosial dan tolong-menolong, serta **akad tijarah** yang bersifat komersial. Akad tijarah, khususnya dalam bentuk mudharabah, menjadi mekanisme penting dalam pengelolaan dana investasi peserta, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta sebagai pemilik modal (shahibul mal).

Penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat, meliputi transparansi, keadilan, amanah, dan bebas dari riba, maysir, serta gharar. Premi peserta dibagi menjadi dua bagian: dana tabarru' untuk membantu peserta yang mengalami musibah, dan dana investasi yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Model ini mencerminkan keseimbangan antara orientasi keuntungan bisnis dengan orientasi sosial, menjadikan asuransi syariah sebagai sarana perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan diatur oleh fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2018. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1(1):11.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Habibaty, Diana Mutia. 2019. "Kesesuaian Polis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6(3):293-302.
- HAIRANI, FITRAH. 2024. "PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVETASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023."
- Ichsan, Nurul. 2014. "Pengantar Asuransi Syariah."
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2(1):42-53. doi: 10.46367/jps.v2i1.295.
- Iswanto, Bambang. 2016. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia."
- Karim, H. Adhiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Temporer*. Gema Insani.
- Mahyudi, Diky, Nuryanti Nuryanti, and Haryetti Haryetti. 2017. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Loyalitas Bagian Kantor Pada PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar."
- Nopriansyah, Waldi. 2024. *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Penerbit Andi.
- Ramadhan, Taufiq. 2022. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *Sahaja* 1(1):45-56. doi: 10.61159/sahaja.v1i1.12.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Tito, Luki, and Nanang Sobarna. 2025. "Konsep Penerapan Akad Mudharabah Pada Sistem Operasional Asuransi Syariah Penyelenggaraan Asuransi Dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip." 5(1).